

INDUSTRI MINYAK KELAPA DI KEBUMEN

1851-1942

**Sri Sulastri
Huddy Husin**

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
Universitas Indraprasta PGRI
srisulastri@gmail.com; hudi0212@gmail.com

Abstrack : Toward the end of the 19th century oil plants to be excellent in international trade, which in addition to the main raw material in making cooking oil, coconut plants can also be of other raw materials such as mentega, soap and pharmaceuticals. Seeing an opportunity in the business world menerapkan colonial government policies relating to the maximization of tanakan coconut planting in Java. Aside from being native plants that are growing region of coastal and inland coconut plantations also be a plant that is consumed by local communities to meet the needs of everyday life. The development of the original management are traditional, slowly into management with bersfiat industrialization, this is the beginning for broader changes in social and economic life of society Kebumen. Through the assessment of business more deeply on coconut oil insudtrialisasi this, we can understand why the development of the economic life of society Kebumen, in fact, is now no longer turn the palm oil industry.

Keyword : Coconut oil, Kebumen.

Abstrak : Memasuki akhir abad ke-19, tanaman kelapa menjadi primadona dalam perdagangan internasional. Dimana selain sebagai bahan baku utama dalam membuat minyak goreng, tanaman kelapa juga dapat menjadi bahan baku lainnya seperti mentega, sabun, dan bahan obat-obatan. Melihat kesempatan dalam dunia usaha tersebut pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan maksimalisasi penanaman tanaman kelapa di tanah Jawa. Selain sebagai tanaman asli yang memang tumbuh di wilayah pesisir dan pedalaman, tanaman kelapa juga menjadi tanaman yang memang dikonsumsi masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Perkembangan pengelolaan yang semula bersifat tradisional, perlahan menjadi pengelolaan dengan bersfiat industrialisasi, hal ini yang menjadi awal bagi perubahan yang lebih luas dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kebumen. Melalui usaha pengkajian lebih mendalam mengenai insudtrialisasi minyak kelapa ini, kita dapat memahami mengapa perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat Kebumen, pada kenyataannya saat ini sudah tidak lagi menghidupkan industri minyak kelapa.

Kata kunci : Minyak Kelapa, Kebumen.

PENDAHULUAN

Minyak kelapa merupakan salah satu komoditi perdagangan yang sudah dikenal sejak masa sebelum Kolonial Belanda berkuasa di Indonesia. Masyarakat pribumi umumnya menggunakan minyak kelapa yang berasal dari pohon kelapa sebagai bahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, yakni memasak (menggoreng). Sementara itu, setelah akhir abad ke-19, saat masyarakat Eropa mengetahui bahwa minyak kelapa dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan margarin dan sabun, permintaan minyak kelapa yang berasal dari Asia, khususnya Hindia-Belanda semakin meningkat (Wahyono dalam Titik Balik Historiografi Indonesia, 2008: 145).

Berdasarkan tingginya permintaan terhadap komoditi minyak kelapa, maka Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda memasukkan minyak kelapa sebagai komoditi utama ekspor Hindia-Belanda. Usaha awal untuk menggalakkan produksi minyak kelapa di Hindia-Belanda, diawali melalui kebijakan Gubernur Jenderal Baron Van Imhoff. Gubernur Jenderal Van Imhoff menerapkan kebijakan awal penanaman kelapa bagi masyarakat yang bermukim di Batavia, dan Bogor, Jawa barat, dimana menurut peraturan tersebut,

setiap orang yang menikah akan diberikan bibit pohon kelapa, dan menanam pohon kelapa yang diberikan oleh penghulu nikah (Wahyono dalam Titik Balik Historiografi Indonesia, 2008: 130).

Kebijakan penanaman pohon kelapa oleh penduduk pribumi, akhirnya diterapkan secara umum di seluruh daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. melalui peraturan yang direkomendasikan oleh *Kabinet-circulaire*, pada 20 Januari 1850 No. 14 (ANRI: Bijbl. 216) mewajibkan kepada seluruh penduduk pribumi untuk menanam, memelihara, dan meminjamkan bibit pohon kelapa kepada penduduk lainnya untuk ditanam di pekarangan rumah mereka masing-masing. Selain menanam dan memelihara, para penduduk juga diwajibkan membangun sarana transportasi untuk pengangkutan hasil pohon kelapa, dan menjaga hama yang dapat merusak tanaman pohon kelapa (Asba, 2007: 15).

Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda tersebut sejatinya berjalan beriringan dengan kebijakan pembukaan lahan perkebunan minyak kelapa di beberapa wilayah yang ada di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Pemerintah kolonial Hindia-Belanda

membuka pabrik-pabrik minyak kelapa yang dikenal dengan nama *Oliefabrieken Insulinde*, dan didirikan di wilayah Kediri, Sentono, Blitar, Tulung Agung, Banyuwangi, Kebumen, Rangkas Bitung, Padang, dan Makasar (Asba, 2007: 19).

Tulisan ini menetapkan Kebumen sebagai wilayah fokus kajiannya, karena di wilayah Kebumen berdiri pabrik minyak kelapa yang sudah dibangun sejak tahun 1851. Pabrik tersebut dikelola oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda dan diberi nama *Oliefabrieken Insulinde Keboemen*. Pabrik minyak kelapa tersebut dikelola oleh Pemerintah Hindia-Belanda hingga tahun 1923, dimana kemudian pengelolaannya diberikan kepada pihak swasta. Perubahan pengelolaan pabrik minyak kelapa tersebut membawa perubahan pula terhadap nama pabriknya, yakni *NV. Mexolie Keboemen*. Perusahaan *NV. Mexolie Keboemen* inilah yang kelak mengelola aktivitas olah industri minyak kelapa di wilayah Kebumen hingga masa akhir penguasaan Hindia-Belanda di Indonesia (Paper Kerja oleh Yayasan Wahyu Pancasila, dipublikasikan di seminar keluarga besar eks karyawan Pabrik Minyak Kelapa Kebumen, pada 31 Mei 2015).

Begitu banyak dinamika yang berjalan berupa pasang-surut dan naik turunnya

pengelolaan industri minyak kelapa di Kebumen ini, khususnya pada masa-masa krisis ekonomi tahun 1930, hingga adaptasi pengelolaan dari pemerintah menuju pihak swasta, dan lain sebagainya. Hal inilah yang dianggap sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam, melalui pendekatan sejarah ekonomi di tingkat lokal Kebumen.

GAMBARAN EKOLOGI DAN SEJARAH KEBUMEN

Kebumen adalah salah satu wilayah yang berada di Jawa Tengah, secara astronomis wilayah Kebumen berada di 109°22'–109°50' Bujur Timur dan 7°27'–7°50' Lintang Selatan. Sementara itu, wilayah Kebumen memiliki luas wilayah darat 128.111,50 hektare atau 1.281,115 km² dan wilayah laut 6.867 km². Keadaan geografis yang demikian, menempatkan Kebumen sebagai wilayah yang menghubungkan antara wilayah Jawa Barat dengan Jawa Timur (www.kebumenkab.go.id/).

Keberadaannya yang seolah-olah menghubungkan dua wilayah Pulau Jawa tersebut, dapat dijabarkan secara umum mengenai batas-batas wilayah Kebumen sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo.

- b. Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo
- c. Sebelah Selatan: Samudera Hindia
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas dan Cilacap.

Dipandang melalui aspek geologis, wilayah Kebumen merupakan wilayah daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah. Sementara itu gambaran iklim tercatat curah hujan terbesar yakni 3.787,00 mm lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 2.328,43 mm, dan hari hujan sebanyak 188 hari lebih sering dari tahun sebelumnya sebanyak 108 hari. Suhu terendah yang terpantau di stasiun pemantauan Wadaslintang pada bulan Juli dengan suhu sekitar 20,60°C dan tertinggi 34,00°C pada bulan Maret. Rata-rata kelembaban udara setahun 81,00% dan rata-rata kecepatan angin 0,23 meter/detik. Sementara pada stasiun pemantauan Sempor suhu terendah 21,60°C terjadi pada bulan Agustus dan tertinggi 33,60°C pada bulan Februari. Rata-rata kelembaban udara setahun 84,00% dan rata-rata kecepatan angin 1,99 meter/detik (<http://www.kebumenkab.go.id/>).

Berdasarkan keadaan geografis dan iklim yang demikian, wilayah Kebumen memiliki kemampuan untuk membangun sektor ekonominya dengan bertumpu pada sektor

agraria. Dataran rendah yang cukup luas, serta ditopang dengan curah hujan dan sumber air yang berasal dari sungai, membuat Kebumen menjadi salah satu lumbung padi di Jawa Tengah. Hal tersebut sudah mampu dibuktikan sejak masa-masa Kerajaan Islam berkuasa di tanah Jawa. Dalam sebuah sumber dijelaskan bahwa pada masa penguasaan Panembahan Senopati, wilayah Panjer (nama awal wilayah Kebumen) merupakan wilayah yang terkenal sebagai lumbung pangan/ padi (Ananda, 2012: Tanpa Halaman).

Berbekal kemampuan dan modal keadaan alam yang mampu untuk membangun struktur ekonomi berbasis agraria tersebut, maka tidaklah mengherankan jika wilayah Kebumen secara umum diisi oleh penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani (hal ini merupakan pola umum yang terdapat di wilayah pedalaman Jawa). Kelompok para petani Kebumen memiliki peran yang cukup besar pada masa Perang Diponegoro, karena segala kebutuhan perbekalan perang yang dibutuhkan oleh pasukan Pangeran Diponegoro, dalam bentuk persediaan pangan dan senjata disediakan oleh masyarakat Panjer (Ananda, 2015 : Tanpa Halaman).

Posisi Panjer (Kebumen) sebagai wilayah

strategis dalam pengadaan logistik bahan pangan kembali terjadi. Pada saat Panjer dipimpin oleh Kalapaking IV, terjadi peristiwa besar di Tanah Jawa yakni dengan meletusnya Perang Diponegoro. Pada tanggal 21 Juli 1826, Pangeran Diponegoro mengirim utusannya ke wilayah Panjer untuk berunding meminta bantuan kepada Panjer. Hasil perundingan tersebut menghasilkan keputusan Panjer untuk membantu Pangeran Diponegoro dalam hal menyediakan logistik dan persenjataan (Carey, 2011: 716).

Keterlibatan Panjer dalam perang Jawa ini, menghadapkan Panjer kepada kekuatan militer asing dan lokal. Pemerintah Kolonial Belanda sebagai musuh Pangeran Diponegoro saat itu, tidak hanya diperkuat oleh kekuatan militernya saja, tapi juga melibatkan kekuatan-kekuatan militer lainnya yang berasal dari Jawa dan luar Jawa. Perang Jawa kemudian berakhir pada tanggal 2 Maret 1830, pada saat Pangeran Diponegoro tertangkap. Meskipun Pangeran Diponegoro tertangkap, perlawanan yang dilakukan oleh Panjer di bawah kepemimpinan Kalapaking IV tetap berlangsung. Pada tahun 1831, ibu kota dan Pendopo Agung Panjer diserang secara besar-besaran, dan kemudian pada tahun 1832 Pendopo Agung Panjer dapat dikuasai

dan dibumihanguskan (Ananda, 2015 ; Tanpa Halaman).

Berakhirnya Perang Jawa, dengan tertangkapnya Pangeran Diponegoro, telah mengakibatkan timbulnya banyak konsekuensi sosial-politik bagi tata kehidupan di Jawa. Perlawanan terakhir tatanan tradisional tersebut (sebutan seperti yang dituliskan oleh Peter Carey dalam buku *Kuasa Ramalan*), seolah-olah menjadi titik balik bagi jalan dan takdir sejarah masyarakat Jawa. Khususnya dalam bidang ekonomi dan politik, kekalahan dan penumpasan perlawanan Pangeran Diponegoro memberikan konsekuensi secara langsung berupa semakin bertambah kuatnya cengkaman dan penguasaan pemerintah kolonial di wilayah *Vorsetenlanden*, dan wilayah lain yang dikuasai oleh Keraton (termasuk wilayah Panjer).

Setelah jatuhnya kekuasaan tradisional di Jawa (khususnya Jawa Tengah), untuk kasus Kebumen jatuhnya kekuasaan tradisional ditandai dengan pembumihangusan Pendopo Agung Panjer pada tahun 1832. Guna mencegah berulangnya peristiwa peperangan seperti Perang Jawa, pemerintah kolonial Hindia-Belanda melakukan berbagai kebijakan baru, khususnya dalam

bidang politik. Salah satunya ialah mengganti para penguasa lokal di Jawa (khususnya di luar wilayah *Vorstenlanden*), dengan orang-orang yang dianggap dan dinilai mampu menguntungkan serta loyal terhadap pemerintah kolonial. Untuk kasus Panjer pada tahun 1851, pemimpin baru diangkat, dengan bergelar Bupati dan bernama Arungbinang IV. Pergantian pemimpin lokal Panjer juga disertai dengan perubahan nama dari Panjer menjadi Kebumen (Ananda, 2015 : Tanpa Halaman).

PENANAMAN DAN BUDIDAYA TANAMAN KELAPA DAN INDUSTRIALISASI AWAL DI KEBUMEN HINGGA AKHIR ABAD KE-19

Berkaitan dengan penelitian ini mengenai tanaman kelapa dan industri minyak kelapa di Kebumen, pelaksanaan dan pembangunan industri minyak kelapa sama sekali berbeda dengan tanaman tebu dan teh. Masyarakat Kebumen tidak lagi harus mempelajari bagaimana menanam dan membudidayakan tanaman kelapa, karena masyarakat Kebumen sudah cukup lama mengenal tanaman kelapa beserta fungsi-fungsinya. Berdasarkan keberadaan gambar relief tanaman kelapa yang berada di Candi

Borobudur, maka tanaman kelapa sudah dikenal oleh penduduk Jawa sejak abad IX Masehi. Berdasarkan sumber yang lain, pada masa Islam menyebar luas di tanah Jawa, para bupati dan tokoh ulama bermufakat agar calon pengantin pria membawa tunas/cikal bakal tanaman kelapa sebagai ongkos nikah kepada penghulu. Meskipun tidak dijelaskan alasannya, akan tetapi kebijakan tersebut tetap dijalankan hingga tahun 1890. Pohon kelapa yang diberikan oleh para calon penganti tersebut, kemudian dibagi-bagikan kepada penduduk untuk ditanam (Winoto, 1904: 8-9).

Kebijakan lainnya yang diterapkan oleh pemerintah kolonial dalam menghidupkan usaha penanaman kelapa di Jawa ialah dengan mengeluarkan kebijakan pelarangan penebangan pohon-pohon kelapa yang dianggap masih produktif. Surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Rochsussen, dimana surat tersebut melarang pohon kelapa digunakan untuk pembuatan pekerjaan umum seperti jembatan dan proyek lainnya (Winoto, 1904: 8-9). Menurut sumber lainnya, tanaman kelapa yang berada di Jawa hingga pada tahun 1851 kira-kira berjumlah 9 juta pohon, dan pada tahun 1872 mencapai 2 juta pohon (Wijs , 1913: 194-195).

Maksimalisasi penanaman pohon kelapa di Jawa hingga awal abad ke-20, sejatinya berjalan dalam model pengelolaan secara tradisional. Secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut : buah kelapa yang dijadikan bibit diambil dari pohon kelapa yang berbuah lebat. Buah yang dibutuhkan ialah yang bentuknya besar dan bentuknya bulat. Dengan menggunakan model “gantung” dan diletakkan diatas tanah yang lembab, persemaian terhadap bibit kelapa ini dilakukan. Berkaitan dengan pemupukan bibit kelapa, petani kelapa di Jawa, biasanya menggunakan campuran garam dan abu untuk menyuburkan dan mendapatkan hasil yang baik (Rucinawati, 2001: 7).

Berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan pohon kelapa yang ditanam dan dibudidayakan oleh para petani di Jawa pada awalnya digunakan untuk memproduksi tuak. Produk-produk lain yang menggunakan bahan dasar kelapa dan batoknya berupa sabut dan alat mengambil air digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sendiri. Begitu pula dengan pembuatan minyak kelapa, para petani kelapa membuatnya untuk kebutuhan sendiri. Baru setelah awal abad ke-20, masuknya perusahaan-perusahaan besar ke Jawa, mengelola kelapa menjadi minyak

kelapa dengan menggunakan teknologi yang modern (Rucinawati, 2001: 11; Awang, 1994: 117).

Memasuki abad ke-20, pembudidayaan kelapa di Jawa secara umum tidak lagi dikelola oleh rakyat, namun juga sudah dikelola oleh perusahaan-perusahaan yang ikut berkecimpung dalam usaha industri minyak kelapa. Dengan hadirnya perusahaan-perusahaan swasta yang beraktivitas dalam usaha industri minyak kelapa, maka orientasi produksi minyak kelapa mendominasi usaha pembudayaan dan pengolahan kelapa di Jawa, dan hanya sebagian kecil saja yang membuat produk-produk berbahan dasar kelapa seperti kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Setelah berakhirnya kebijakan *Culturstelsel* di tanah Jawa, dimulailah era liberalisasi ekonomi di Jawa. Khususnya dalam sektor ekonomi dimulailah satu era industrialisasi awal dengan semangat liberalisasi. Fenomena masuknya perusahaan-perusahaan swasta, baik yang dimiliki oleh para pengusaha Belanda dan Eropa lainnya menjadi pertanda dimulainya dominasi ekonomi industri terhadap

ekonomi tradisional masyarakat¹. Dengan begitu usaha ekonomi kelapa tradisional rakyat mulai berada di bawah kendali industri pengolahan minyak kelapa milik pengusaha asing di Jawa.

Masa awal industrialisasi minyak kelapa di Kebumen diawali dengan beralih fungsinya Pendopo Panjer Agung pada tahun 1851 menjadi pabrik minyak kelapa Belanda pertama dan terbesar di Nusantara, dengan nama *NV. Oliefabrieken Insulinde*. Dimana hasil produksinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional Eropa dan Amerika (Ananda, 2015: Tanpa Halaman). Meski keberadaan pabrik minyak kelapa di Kebumen menjadi yang cukup terbesar di Jawa, akan tetapi tidak didapatkan data-data mengenai berapa jumlah secara pasti minyak kelapa yang mampu dihasilkan dari perusahaan tersebut setiap tahunnya. Akan tetapi, melalui sumber-sumber didapatkan jumlah konsumsi minyak kelapa di Jawa, sebagai berikut :

Tahun	Konsumsi Minyak Kelapa (Ribuan Liter)	Konsumsi Minyak per kepala (liter)
1922	34.772	1
1923	40.929	1,16
1924	44.574	1,26
1925	65.242	1,83
1926	68.281	1,89

Sumber : *Korte Berichten van Landbouw. Nijverheid en Handel. 26 Agustus 1927. No. XLIII*

Jumlah konsumsi minyak kelapa bagi pemenuhan kebutuhan lokal ini, juga berjalan beriring dengan jumlah ekspor minyak kelapa dari Hindia-Belanda ke pasar internasional. Berdasarkan laporan yang ada jumlah ekspor tanaman kelapa yang berasal dari Jawa mulai tercatat sejak tahun 1884, karena sebelum tahun tersebut ekspor kopra lebih banyak dilakukan dari luar pulau Jawa (Creutzberg dan Van Laanen, 1987: 165). Meskipun jumlah angka ekspor kelapa yang berasal dari Jawa tidak didapatkan angka yang pasti, akan tetapi Hall dan van de Koppel menyatakan bahwa pada awal abad ke-20 terjadi peningkatan jumlah ekspor yang cukup tinggi, dan pada tahun 1914 perdagangan minyak kelapa menjadi salah satu komoditi dagang yang paling penting (Creutzberg dan Van Laanen, 1987: 165).

¹Guna lebih memperjelas fenomena ini dapat diperdalam melalui kajian Sartono Kartodirjo dalam buku “ *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional*”; Jan Breman dalam bukunya “*Keuntungan Kolonial Dari Sistem Tanam Paksa Kopi di Priangan*”.

Sumber lain yang menerangkan mengenai kebijakan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda berkaitan dengan penetapan produksi dan konsumsi minyak kelapa di Jawa, dijelaskan oleh Scheltema. Pemerintah kolonial menetapkan bahwa angka produksi minyak kelapa di Jawa pada medio 1916–1919 mencapai angka 329.000 ton, dengan tingkat konsumsi 97 kg/orang setiap tahunnya. Melalui angka tersebut, menurut Scheltema didapatkan angka sebesar 220.000–230.000 ton. Angka tersebut juga menjadi batas jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai jumlah minyak kelapa yang boleh didistribusikan di dalam negeri (Scheltema, 1921: 305).

pabrik minyak kelapa *N.V. Oliefabrieken Insulinde* di Kebumen, sebagai pabrik yang terbesar di Jawa, dapat diperkirakan sebagai pabrik minyak kelapa yang turut menyumbangkan angka produksi dan penjualan yang cukup tinggi bagi pemerintah kolonial. Mengingat keberadaannya di tanah Jawa yang sudah memiliki tingkat sarana prasarana yang cukup baik dibandingkan dengan yang ada di luar Pulau Jawa. Selain itu, keberadaan alat transportasi yang lebih baik, sebagai alat pengangkutan, juga akan memberikan

suporting terhadap aktivitas ekspor minyak kelapa ke pasar internasional.

Keberadaan pabrik *N.V. Oliefabrieken Insulinde* di Kebumen selain memberikan peluang usaha bagi masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas industri sebagai buruh pabrik, juga memberikan kesempatan bagi para petani untuk mengarahkan hasil tanaman kelapa rakyat (miliki petani) untuk didistribusikan ke pabrik *N.V. Oliefabrieken Insulinde*. Keberadaan pabrik minyak kelapa tersebut, jika ditinjau lebih mendalam mungkin akan berdampak ganda. Di satu sisi akan memberikan peluang bagi petani terlibat dalam usaha mendapatkan pendapatan selain dari profesi sebagai petani biasa (dengan menjadi buruh pabrik minyak kelapa), namun di sisi lain menghilangkan kesempatan petani untuk dapat terlibat sebagai pelaku aktif ekonomi pengolahan minyak kelapa, karena perbedaan teknologi pengolahan yang cukup signifikan.

RESPONS MASYARAKAT DAN PERKEMBANGAN LANJUTAN

Pembangunan industri minyak kelapa ditinjau Jawa secara umum sangatlah berbeda dengan industri perkebunan lainnya seperti tebu, teh, dan kopi. Pada awal subbab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa terdapat

pengelolaan yang terpisah antara budidaya/ penanaman kelapa yang dilakukan secara langsung oleh petani dan pengolahan kelapa (kopra) menjadi minyak kelapa yang langsung ditangani oleh pemerintah kolonial dan perusahaan swasta. Meskipun secara kasatmata terjadi pemisahan antara aktivitas budidaya/penanaman, serta pengolahan minyak kelapa, kedua aktivitas tersebut tidak dapat dipisahkan sebagai mata rantai mekanisme produksi minyak kelapa di Jawa.

Melihat potensi wilayah Kebumen yang berada di wilayah pesisir pantai, tingkat kesuburan tanah yang cukup baik, ditambah pola hujan yang juga cukup teratur, maka Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda menetapkan Kebumen sebagai wilayah yang akan dibangun industri pengolahan minyak kelapa di Jawa Tengah. Pembangunan industri pengolahan minyak kelapa di Kebumen, diawali dengan mengubah alih fungsi bangunan bekas Pendopo Agung Panjer menjadi kawasan pabrik minyak kelapa. Hal tersebut terjadi pada tahun 1851, dengan resmi didirikannya pabrik minyak kelapa *NV. Oliefabrieken Insulinde*.

Berkaitan dengan partisipasi dan respon masyarakat Kebumen terhadap keberadaan pabrik minyak kelapa *NV. Oliefabrieken Insulinde*, tidak didapatkan data yang valid

mengenai derajat partisipasi masyarakat lokal Kebumen. Hal ini tidaklah mengeherankan karena tanaman kelapa sejatinya merupakan sumber bahan mentah bagi petani untuk menghasilkan barang-barang yang dikonsumsi bagi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan kata lain belum memiliki nilai komersil yang tinggi. Menurut Rucinawati (2001: 9–11), barang-barang komoditi tersebut diantaranya ialah minyak klentik, kethak yang dapat dikonsumsi, ampasnya yang dapat digunakan sebagai makanan babi, serabut kelapa digunakan sebagai alat pembersih dan batok kelapa biasanya digunakan sebagai alat mengambil air dan menjadi arang untuk memasak dan membuat makanan.

Kesadaran dan pengetahuan tentang nilai komersial yang termuat dalam tanaman kelapa dan keberadaan teknologi yang masih tradisional dapat menjadi jawaban mengapa kelompok petani di Kebumen belum dapat berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam proses produksi minyak kelapa di pabrik minyak kelapa *NV. Oliefabrieken Insulinde*. Berkaitan dengan kelompok yang cukup aktif dalam proses produksi minyak kelapa sebelum masuk kedalam parik minyak kelapa *NV. Oliefabrieken Insulinde*.

Menurut sumber yang didapat, kelompok saudagar/pedagang Cina dan Arab adalah kelompok yang sangat aktif dalam menampung kelapa dan mendistribusikan ke pabrik minyak kelapa *NV. Oliefabrieken Insulinde* (Rucinawati, 2001:15). Keadaan tersebut juga tidak terlalu mengherankan, karena kelompok pedagang Cina dan Arab memang dikenal memiliki jaringan dagang dan posisi tawar dalam aktivitas ekonomi di Hindia Belanda hingga akhir era penguasaan kolonial Belanda².

Sebelum abad ke-19 berakhir, sekiranya dapat dipahami juga karena di Kebumen, jenis-jenis mata pencaharian tidak hanya terdapat satu jenis pekerjaan saja, akan tetapi juga memiliki tingkat keragaman jenis-jenis mata pencaharian lainnya. Menjadi petani tanaman kelapa bukanlah satu mata pencaharian yang utama, karena mayoritas menjadi petani beras, dan produk kebutuhan pokok sehari-hari lainnya. Partisipasi petani Kebumen dalam rangka proses produksi minyak kelapa di pabrik

NV. Oliefabrieken Insulinde memang belum memiliki arti kuantitas yang tinggi.

Naiknya derajat keikutsertaan para petani Kebumen dalam proses produksi minyak kelapa di pabrik *NV. Oliefabrieken Insulinde*, tidak terlepas dari kebijakan ekonomi dan kebijakan pemerintah kolonial dalam membuka sarana infrastruktur transportasi. Kebijakan ekonomi yang dimaksud adalah masuknya aliran uang (moneter) ke dalam wilayah Kebumen dalam bentuk beroperasinya *Java Bank*, mengaliri investasi/ uang ke wilayah Kebumen. Aliran investasi ini menjadi modal utama yang menghidupkan perkembangan industri minyak kelapa di Kebumen (Padmo, 2004: 86).

Aliran modal dan pembukaan sarana transportasi mempermudah jalur pengangkutan dan memberikan kepastian biaya produksi terhadap produksi minyak kelapa yang dilakukan oleh pabrik minyak kelapa *NV. Oliefabrieken Insulinde*. Dengan keberadaan dukungan dari sektor keuangan dan transportasi yang cukup memadai pada masa itu, derajat komersial terhadap tanaman kelapa mulai meningkat. Hal ini terwujud dalam bentuk skema transaksi perdagangan yang lebih mendetail dalam

²Untuk lebih memperdalam mengenai posisi tawar para pedagang Cina di Jawa dan umumnya di Nusantara masa penguasaan kolonial Hindia-Belanda, dapat dipahami lebih lanjut dalam karya-karya berikut : Abdul Wahid dalam bukunya “*Komunitas Tionghoa dan Ekonomi Kota Cirebon*”; Yerry Wirawan dalam buku “*Sejarah Masyarakat Etnis Tionghoa Makassar dari Abad 17 hingga ke - 20*”; Onghokham dalam karyanya “*Anti Cina, Kapitalisme Cina dan Gerakan Cina*”.

mekanisme produksi minyak kelapa di Kebumen.

Guna melihat sejauh mana (tinggi-rendahnya) tingkat respon masyarakat Kebumen terhadap keberadaan industri perkebunan minyak kelapa, dapat pula dilihat melalui sejauh mana masyarakat Kebumen berpartisipasi dalam bentuk penyerapan tenaga kerja di pabrik minyak kelapa *NV. Oliefabrieken Insulinde*. Sejauh penyelidikan sumber mengenai jumlah penyerapan tenaga kerja dalam pabrik minyak kelapa *NV. Oliefabrieken Insulinde* di Kebumen, memang tidak didapatkan data yang cukup valid. Akan tetapi melihat jumlah produksi minyak kelapa ekspor dari Jawa yang semakin meningkat, dinilai terdapat korelasi dengan penyerapan tenaga kerja³. Hal ini dapat dipahami karena sebelum tahun 1910, teknologi pengolahan

minyak kelapa belum ditopang oleh industri yang modern (Rucinawati, 2001: 12).

Penyerapan tenaga kerja yang dimaksud dalam subbab ini adalah peran masyarakat petani Kebumen dalam alur mekanisme produksi minyak kelapa menjadi bahan jadi, yang siap diekspor. Menurut Effendi Wahyono, ketika tanaman kelapa mulai diterapkan menjadi komoditi yang harus ditanam oleh para penduduk pribumi pasca pelaksanaan kebijakan tanam paksa, peran kelompok pribumi terdapat dalam sektor tenaga kerja yang melakukan perawatan terhadap tanaman kelapa. Penjelasan yang diberikan oleh Effendi Wahyono ini sejalan dengan penjelasan yang diberikan oleh peneliti sebelumnya, berkaitan masih lemahnya tingkat partisipasi masyarakat Kebumen dalam aktivitas produksi minyak kelapa sebelum memasuki abad ke-20. Faktor tersebut terdiri dari dua hal utama, yakni jenis atau mode produksi feodal yang masih dapat dilihat dalam ciri ekonomi subsistem (memenuhi kebutuhan sendiri, belum ada pengetahuan untuk berpikir komersial), dan keberadaan pengetahuan dan teknologi yang masih rendah bagi petani untuk mengelola tanaman kelapa.

Memasuki abad ke-20, perkembangan perusahaan tanaman kelapa di Hindia-

³Penjelasan mengenai bentuk ekonomi pra-kapitalis dengan ekonomi kapitalisme industri dapat ditemukan dalam karya Robert Heilbroner yang berjudul “Terbentuknya Masyarakat Ekonomi”, Heilbroner menjelaskan bahwa dalam bentuk ekonomi pra-kapitalis ciri yang paling mendasar ialah keberadaan tenaga kerja yang cukup melimpah”padat karya”, sementara itu dalam masyarakat Industri, keberadaan tenaga kerja atau kebutuhan akan tenaga kerja dapat diatasi dengan pemenuhan atau supporting teknologi untuk menggantikan tenaga kerja manusia, dalam hal ini disebut bentuk ekonomi seperti ini disebut oleh Heilbroner, sebagai ekonomi kapitalis yang berbentuk “ekonomi padat modal”

Belanda, khususnya yang berada di tanah Jawa semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan melalui sumber yang didapatkan melalui laporan-laporan kemajuan industri perkebunan kelapa. Berikut ini adalah data-data mengenai produksi tanaman kopra di Jawa dan jumlah ekspor tanaman kopra yang berasal dari Jawa ke pasar internasional :

Tahun	Tanaman Kopra (ton metrik x 1.000)
1900	Angka tidak tersedia
1905	Angka tidak tersedia
1910	Angka tidak tersedia
1915	Angka tidak tersedia
1920	Angka tidak tersedia
1925	17,5
1930	25,7

Sumber : Diolah melalui J.S. Furnivall, Hindia Belanda : Studi Tentang Ekonomi Majemuk, Jakarta : Freedom Institute, 2009, hlm. 333

Volume Ekspor Pertanian (Ribu ton), 1891-1930

Tahun	Kopra
1891	-
1900	67
1913	229
1920	182
1930	375

Sumber : Diolah melalui J.S. Furnivall, Hindia Belanda : Studi Tentang Ekonomi Majemuk, Jakarta : Freedom Institute, 2009, hlm. 355

Meskipun data yang ditunjukkan oleh Furnivall lebih bersifat umum mengenai gambaran industri minyak kelapa di Jawa, melalui data tersebut kita mendapatkan gambaran bahwa terjadi peningkatan yang cukup baik dari produksi minyak kelapa di Jawa. Peningkatan ini tidak hanya memberikan keuntungan berupa pendapatan finansial yang besar bagi pemerintah kolonial, akan tetapi juga memberikan kesempatan bagi pemerintah kolonial untuk menjadi distributor alternatif bagi pasar internasional, mendapatkan bahan minyak kelapa (menyaingi distributor lainnya yakni Amerika Latin).

Perkembangan industri minyak kelapa di Jawa, khususnya di wilayah Kebumen, tidak terlepas dari situasi politik dan kebijakan ekonomi Kerajaan Induk di Belanda. Penerapan kebijakan liberalisasi dalam sektor pertanian dan perkebunan, membuka peluang bagi masuknya modal-modal swasta untuk bersaing dan bahkan mengakuisisi perkebunan yang sebelumnya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kolonial. Keadaan ini mulai terasa ketika memasuki tahun 1920-an, dimana penerapan swastanisasi atau lebih tepatnya disebut proses

korporatisasi semakin merebak di sebagian besar daerah-daerah industri perkebunan di Jawa (Padmo, 2004: 97).

Memasuki awal abad ke-20, terjadi proses pengambilalihan sentra-sentra ekonomi yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah kolonial, kemudian sedikit-demi sedikit diambil alih oleh kekuatan ekonomi swasta. Fenomena ini dapat terjadi karena banyak hal, di antaranya karena pemerintah kolonial (merugi) dalam memberikan pembiayaan sebuah industri, dimana hasil penjualannya kemudian tidak memberikan keuntungan (selisih antara modal dan keuntungan sedikit) kepada pemerintah kolonial⁴.

Selain dinamika di lapangan mengenai naik turunnya dan merosotnya nilai jual sebuah komoditi perdagangan yang memaksa pemerintah kolonial menswastanisasikan aset-aset industri mereka, juga terdapat faktor lain yakni tekanan dari parlemen di Belanda yang menginginkan pemerintah Kerajaan Belanda memberikan kesempatan bagi kekuatan

modal swasta untuk dapat masuk ke dalam arena industri di Hindia-Belanda. Tekanan untuk membuka keran liberalisasi terhadap negeri jajahan, pada akhirnya berlaku dan diterapkan hampir di semua lini yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah (tidak hanya perkebunan, akan tetapi juga masuk kewilayah lain seperti transportasi, pelabuhan, bank, dan lain sebagainya).⁵

Pada masa swastanisasi industri perkebunan di Hindia Belanda (khususnya di Jawa), terjadi fenomena dimana pemilik perkebunan menjadi semakin terpisah dari manajemen perusahaan yang dimilikinya. Biasanya ditandai dengan mekanisme pelaporan dari kemajuan dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh manajer perkebunan kepada para pemiliknya yang berada di Belanda. Hal tersebut dapat dimaklumi karena keberadaan yang cukup jauh antara Negeri Induk dan Negeri Jajahan, yang mengakibatkan para pemilik perusahaan harus memberikan perwakilannya mengelola aset-aset industri yang dimilikinya di Negeri Jajahan (Padmo, 2004: 100).

⁴Fenomena meruginya pemerintah kolonial dalam beberapa jenis industri, telah dijelaskan dengan cukup baik oleh Soegijanto Padmo, dalam karyanya Bunga Rampai Sejarah Ekonomi Indonesia. Salah satu komoditi yang anjlok dan kemudian dilakukan upaya swastanisasi oleh pemerintah kolonial adalah industri teh di Jawa.

⁵Guna lebih mempertajam dalam membahas mengenai proses swastanisasi di Jawa dan Hindia-Belanda pada umumnya dapat diperdalam dalam karya-karya lainnya seperti : Sartono Kartodirjo, dalam karyanya “ *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : 1500-1900*”; Susanto Zuhdi dalam karyanya “*Cilacap 1830-1942*”.

Menurut Soegijanto Padmo, kantor perwakilan memiliki tugas yang cukup berat dan penting yakni mengkoordinasikan kegiatan pemasaran dengan aktivitas ekspor, akan tetapi dalam beberapa kasus menurut Soegijanto Padmo, juga terdapat fenomena kantor perwakilan juga bertindak sebagai eksportir komoditas pertanian dan perkebunan dari Jawa ke Eropa (Padmo, 2004: 101). Fenomena mengenai korporatisasi industri-industri perkebunan di Jawa, khususnya untuk kasus industri perkebunan minyak kelapa di wilayah Kebumen juga menghadap keadaan yang demikian. Perusahaan minyak kelapa di Kebumen juga mengalami proses swastanisasi, dimana pengambil alihan pabrik minyak kelapa di Kebumen, ditandai dengan perubahan nama pabrik tersebut. Sebelumnya bernama *NV. Oliefabrieken Insulinde*, kemudian menjadi *NV. Mexolie Keboemen*, situasi ini terjadi pada tahun 1923⁶.

Ketertarikan pihak swasta untuk terlibat dalam pengelolaan dan perdagangan kelapa beserta minyak kelapa, tidak terlepas dari kemakmuran yang dihasilkan dari aktivitas

perdagangan kelapa di Hindia-Belanda. pada awal abad ke-20, sebelum meletusnya Perang Dunia I, kelapa beserta minyak kelapa hasil olahan menjadi komoditi yang penting dan banyak diminati oleh pasar di Eropa. Kenaikan atas harga jual kopra semakin tidak terbendung mana kala daerah penghasil kopra lainnya di Jawa (Banyuwangi) mengalami kegagalan dalam proses pengelolaan tanaman kelapa, akibat diserang hama tanaman.

Berkaitan dengan harga jual kelapa kopra sebelum meletusnya Perang Dunia I, pada beberapa sentra penjualan kopra di wilayah pesisir utara Jawa, seperti Surabaya, tercatat harga jual kopra mencapai f. 1825 per pikul. Harga tersebut adalah harga tertinggi penjualan kopra selama awal abad ke-20, sebelum Perang Dunia I meletus. Kemudian harga tersebut menjadi turun pada tahun 1914, dimana harga jual kopra menjadi f. 15,60–f. 15,80 per pikul dan pada akhir tahun 1914, harga kopra berada di angka f.14–f. 14,875 per pikul (Rucinawati, 2001: 18).

Setelah berakhirnya tahun 1914, perdagangan kopra yang sebelumnya sempat jatuh pada harga yang terendah, perlahan-lahan kembali membaik. Hal tersebut dapat dilihat melalui harga kopra yang kembali

⁶Surat Kabar “*Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlansch-Indie*”, 17 April 1915; Ravie Ananda, *Sejarah Singkat PMK Sarinabati Panjer-Kebumen*, 31 Mei 2015., tanpa halaman.

naik diangka f.19–f. 19,25 per pikul. Keadaan membaik tersebut tidak terlepas dari mulai meredanya konflik/ peperangan di kawasan Eropa. Jadi, perdagangan dan pengiriman kopra ke wilayah Eropa dapat kembali dibuka, meskipun dalam beberapa waktu kopra sempat diperdagangkan secara ilegal (menjadi barang selundupan).

Mekanisme penjualan kelapa di Jawa, khususnya di wilayah Kebumen telah menghasilkan satu kelompok sosial yang cukup diuntungkan dengan keberadaan perdagangan dan industri minyak kelapa. Pada subbab sebelumnya penulis sudah menjelaskan bahwa kelompok pedagang Cina dan Jepang adalah kelompok pedagang yang cukup diuntungkan melalui naiknya transaksi perdagangan kelapa di Jawa. Keberadaan mereka disatu sisi memang memberikan poin positif, karena mereka adalah kelompok pedagang yang cukup aktif melepas arus modal/ investasi keuangan hingga ke tangan para petani kelapa. Di sisi lain, keberadaan mereka juga dapat menjadi perangkap bagi petani kelapa, karena mereka menggunakan sistem gadai dalam melakukan transaksi dagang kepada petani⁷.

⁷Van der Kolff, G.H. “*Overheidsbemoeieinis met de bij de kalppercultuur der Inlandsche bevolking betroken belangen*”, Koloniale Studien. Jilid 1., hlm. 193.

Selain menggunakan sistem gadai dalam transaksi perdagangan kopra dengan petani kelapa, para pedagang Cina dan Jepang juga menggunakan model transaksi dengan sistem kontrak. Kedua jenis tersebut secara umum dipandang negatif, karena mereka menjerat kelompok petani kelapa dengan jalan memberikan panjar (Rucinawati, 2001: 19). Dengan sistem panjar ini, kelompok petani yang sudah menerima uang pada 6 bulan sebelumnya tidak dapat meminta uang lebih manakala harga jual kelapa di kemudian hari mengalami kenaikan. Uang muka yang telah diberikan kepada petani, umumnya akan segera habis, karena biaya kehidupan yang cenderung meningkat dan biaya pembayaran pajak yang diterapkan oleh pemerintah kolonial.

Perkembangan paling awal yang terjadi pada medio awal abad ke-20 berkaitan dengan perusahaan minyak kelapa di Kebumen dan di Jawa secara umum ialah munculnya industrialisasi dan korporatisasi dalam industri minyak kelapa. Hal ini memberikan konsekuensi berupa pembentukan sistem dan mekanisme kerja yang rasional dan terencana dari proses pengolahan minyak kelapa di Kebumen. Proses korporatisasi ini mengubah secara mendasar sifat dan karakter dari industri

pengolahan minyak kelapa di Kebumen, dari yang semula bersifat pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi pemenuhan kebutuhan bersifat massal. Hal ini dapat terjadi karena sejak menjelang berakhirnya abad ke-19, komoditi kopra beserta minyak kelapa sudah mulai masuk kedalam jaringan pasar internasional, dan menjadi semakin kokoh pada periode awal abad ke-20.

PENUTUP

Berkaitan dengan tulisan ini mengenai tanaman kelapa dan industri minyak kelapa di Kebumen, pelaksanaan dan pembangunan industri minyak kelapa sama sekali berbeda dengan tanaman tebu dan teh. Masyarakat Kebumen tidak lagi harus mempelajari bagaimana menanam dan membudidayakan tanaman kelapa, karena masyarakat Kebumen sudah cukup lama mengenal tanaman kelapa beserta fungsi-fungsinya. Berdasarkan keberadaan gambar relief tanaman kelapa yang berada di Candi Borobudur, maka tanaman kelapa sudah dikenal oleh penduduk Jawa sejak abad IX Masehi.

Berdasarkan sumber yang lain, pada masa Islam menyebar luas di tanah Jawa, para bupati dan tokoh ulama bermufakat agar calon pengantin pria membawa

tunas/cikal bakal tanaman kelapa sebagai ongkos nikah kepada penghulu, meskipun tidak dijelaskan alasannya akan tetapi kebijakan tersebut tetap dijalankan hingga tahun 1890. Pohon kelapa yang diberikan oleh para calon penganti tersebut, kemudian dibagi-bagikan kepada penduduk untuk ditanam. Kebijakan lainnya yang diterapkan oleh pemerintah kolonial dalam menghidupkan usaha penanaman kelapa di Jawa ialah dengan mengeluarkan kebijakan pelarangan penebangan pohon-pohon kelapa yang dianggap masih produktif. Surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Rochsussen, dimana surat tersebut melarang pohon kelapa digunakan untuk pembuatan pekerjaan umum seperti jembatan dan proyek lainnya.

Menurut sumber lainnya, tanaman kelapa yang berada di Jawa hingga pada tahun 1851 kira-kira berjumlah 9 juta pohon, dan pada tahun 1872 mencapai 2 juta pohon. Maksimalisasi penanaman pohon kelapa di Jawa hingga awal abad ke-20, sejatinya berjalan dalam model pengelolaan secara tradisional. Secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut : Buah kelapa yang dijadikan bibit diambil dari pohon kelapa yang berbuah lebat. Buah yang dibutuhkan ialah yang bentuknya besar dan bentuknya bulat.

Dengan menggunakan model “gantung” dan diletakkan diatas tanah yang lembab, persemaian terhadap bibit kelapa ini dilakukan. Berkaitan dengan pemupukan bibit kelapa, petani kelapa di Jawa biasanya menggunakan campuran garam dan abu untuk menyuburkan dan mendapatkan hasil yang baik.

Kemudian Perkembangan paling awal yang terjadi pada medio awal abad ke-20 berkaitan dengan perusahaan minyak kelapa di Kebumen dan di Jawa secara umum ialah munculnya industrialisasi dan korporatisasi dalam industri minyak kelapa. Hal ini memberikan konsekuensi berupa pembentukan sistem dan mekanisme kerja yang rasional dan terencana dari proses pengolahan minyak kelapa di Kebumen.

Proses korporatisasi ini mengubah secara mendasar sifat dan karakter dari industri pengolahan minyak kelapa di Kebumen, dari yang semula bersifat pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi pemenuhan kebutuhan bersifat massal. Hal ini dapat terjadi karena sejak menjelang berakhirnya abad ke-19, komoditi kopra beserta minyak kelapa sudah mulai masuk kedalam jaringan pasar internasional, dan menjadi semakin kokoh pada periode awal abad ke-20. Perkembangan pengolahan minyak kelapa

menjadi bercirikan korporasi, juga berdampak kepada pengenalan masyarakat petani di Kebumen kepada sistem *moneter* (keuangan). Dimana hal ini secara umum memang fenomena yang seragam dengan model-model industri dalam jenis-jenis komoditi lainnya, akan tetapi tetap memberikan pola yang unik dan berbeda dengan model lainnya. Industrialisasi dan korporatisasi pengolahan minyak kelapa di Kebumen, sangat didukung oleh faktor investasi dan modal, maka sudah menjadi sebuah keniscayaan jika fenomena *monetisasi* industri minyak kelapa menjadi satu hal yang umum terjadi di awal abad ke-20.

Perkembangan lanjutan, beserta dampak dari masuknya pabrik minyak kelapa langsung dalam aktivitas produksi di Kebumen, berupa pengolahan minyak kelapa dengan dua model yakni pengolahan secara tradisional dan modern. Keberadaan pabrik minyak kelapa di Kebumen *NV. Mexolie Keboemen*, sejak tahun 1923 tidak hanya memberikan perkembangan dan dampak yang dirasakan dalam sektor sosial dan ekonomi (berupa penyerapan tenaga kerja dan komersialisasi tanaman kelapa), lebih dari itu dampak lain juga dirasakan dalam aspek geografis. Semakin pesat dan

berkembangnya industri minyak kelapa di Kebumen, memberikan konsekuensi berupa pembukaan lahan yang lebih luas (areal tanam) pohon kelapa. Hal ini dilakukan untuk dapat mengimbangi antara proses produksi dengan permintaan dan penawaran dari pasar minyak kelapa.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

A.M.P.A. Scheltema, "*Het verbruik der voornaamste voedings-middelen op Java en Madoera*" *Koloniale Studien*, Jilid 5 bagian 1, hlm. 305 dst, Batavia, 1921.

Van der Kolff, G.H. "*Overheidsbemoeyenis met de bij de kalppercultuur der Inlandsche bevolking betroken belangen*", *Koloniale Studien*. Jilid 1.

J.J.A. Wijs, *Oliegewassen. K.V. Van Gorkom. Oost-Indische Cultures* (Amsterdam : J.H. de Bussy, 1913).

Surat Kabar

"*Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlansch-Indie*", 17 April 1915

Buku

Asba, Rasyid. 2007. **Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah : Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia**. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Carey, Peter. 2012. **Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785-1855**. KPG. Jakarta.

Creutzberg, Pieter dan J.T.M van Laanen. 1987. **Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia**. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Furnivall, J.S. 2009. **Hindia-Belanda Studi Tentang Ekonomi Majemuk**. Freedom Institute. Jakarta.

Marihandono, Djoko (penyunting). 2008. **Titik Balik Historiografi di Indonesia**. Wedatama Widya Sastra. Jakarta.

Padmo, Soegijanto. 2004. **Bunga Rampai Sejarah Sosial-ekonomi Indonesia**. Aditya Media. Yogyakarta

Ravie Ananda, "*Sejarah Sarinabati Kebumen*", (Kebumen, 31 Mei 2015)

Winoto, Tirta Adi, **Perihal Goenanja dan Panennya Kalapa** (Batavia : Landsdrukkj, 1904).